



**RENCANA KINERJA
TAHUNAN
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2019 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen RKT merupakan komitmen Bappeda Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen RKT Tahun 2019. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi segenap aparatur Bappeda Kota Banda Aceh pada khususnya untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun ke depan.

Banda Aceh, Januari 2019
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



Ir. Guameri, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19590810 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum BAPPEDA.....	1
1.2. Struktur Organisasi	1
1.3. Tujuan Penyusunan RKT	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	11
2.1. Visi dan Misi.....	11
2.2. Tujuan, Sasaran dan Program.....	14
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	20
3.1. Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2018.....	20
3.2. Penetapan Kinerja	27
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran I RS (Rencana Strategik) Tahun 2017-2022	
2. Lampiran II Penetapan Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019	
3. Struktur Organisasi	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum BAPPEDA

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Banda Aceh, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 bagi Kepala Bappeda Kota Banda Aceh kepada Walikota.

Untuk menyukseskan pelaksanaan program pembangunan tahun 2019, dan memudahkan evaluasi pelaksanaan kegiatan maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Bappeda, perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019. RKT tersebut diuraikan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD tahun 2017-2022.

1.2 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan daerah. Rincian tugas Bappeda kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi,

kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Kepala Subbagian;
 - g. Kepala Subbidang;
 - h. UPTB GIS; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi, membawahi:
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program; dan
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi:
 - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan; dan
 - c. Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.

- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi; dan

c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.

(6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

a. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;

b. Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana; dan

c. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

d.

1.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bappeda Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah personil (pegawai) yang cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi. Secara keseluruhan, bulan Januari 2019 jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh sebanyak 50 orang. 50 orang pegawai Bappeda sudah berstatus PNS sedangkan 9 orang pegawai berstatus pegawai Kontrak. Jumlah terbesar PNS pada golongan III/d sebanyak 20 orang, diikuti golongan III/c sebanyak 8 orang. Jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	1	2	
3	IV/a	-	7	7	
4	III/d	7	13	20	
5	III/c	4	4	8	
6	III/b	2	4	6	
7	III/a	2	0	2	
8	II/d	-	-	-	
9	II/c	1	1	2	
10	II/b	1	0	1	
11	II/a	1	-	1	
12	I/d	-	-	-	
	Jumlah PNS	21	29	50	
	Non PNS	6	3	9	

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	JML PNS + NON PNS	25	32	59	

Tingkat kecakapan yang dimiliki dapat dikaji melalui beberapa faktor utama, misalnya derajat pendidikan formal, pengalaman jabatan dan eselonering, kursus-kursus atau latihan jabatan, dan lain-lain. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 23 orang, diikuti oleh tingkat S2 sebanyak 19 orang SLTA sebanyak 6 orang dan D3 sebanyak 3 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah sangat menunjang Bappeda sebagai sebagai sebuah institusi perencana.

Tabel.1.2.
Jumlah Pegawai Bappeda (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	19
2	S 1	23
3	D III	2
4	SLTA	6
5	SLTP	1
	Jumlah	50

Dalam hal sarana dan prasarana pada Tahun 2019 Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset yang cukup memadai seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Perlengkapan Bappeda Kota Banda Aceh

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	TANAH	1	6.336.087.000
2	PERALATAN DAN MESIN	866	3.972.594.030
3	BANGUNAN GEDUNG	13	3.546.148.000
4	INSTALASI JARINGAN	2	123.601.000
5	ASSET TETAP LAINNYA	3	420.000
	Jumlah	885	13.978.850.030

1.2.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Kewenangan:

- a. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
- d. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang;
- f. mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
- g. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
- h. meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
- i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan

j. melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

▪ **Tugas dan Fungsi Kepala Bappeda**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.

▪ **Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi**

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan**

Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Tujuan Penyusunan RKT

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017-2022. Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019 adalah:

- Sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2019; dan
- Sebagai bahan dan salah satu dasar acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis sosial, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah juga harus sinergi dengan perencanaan pembangunan dari pusat sehingga tercipta keharmonisan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Untuk itu diperlukan adanya sistem perencanaan desentralisasi dengan menjangkau kebutuhan riil masyarakat dan memadukan dengan program pemerintah. Dengan adanya paradigma perencanaan tersebut, maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk menentukan arah pembangunannya berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

2.1.1 Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, BAPPEDA Kota Banda Aceh yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya. Bappeda mengarah pada upaya pencapaian visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yaitu: **“Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah”**.

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kata penting yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah Menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

2.1.2 Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh BAPPEDA sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Misi kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.
Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Program

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Misi yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi Bappeda ada di Misi ke 5 (Lima) yaitu **meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**, sehingga untuk mendukung misi tersebut tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah **Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif**.

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dimana dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan tertentu secara berkelanjutan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Banda Aceh adalah **Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif**

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-							
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.1	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.	1.1.1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1.1.1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	76% (140 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	78% (144 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	80% (148 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	82% (151 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	84% (155 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
				1.1.1.2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD)				
				1.1.1.3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD)				
				1.1.1.4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	65% (13 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	70% (14 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	75% (15 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	80% (16 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	85% (17 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		1.1.2.1	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	33% (90 Usulan dari 270 Usulan)	34% (92 Usulan dari 270 Usulan)	35% (95 Usulan dari 270 Usulan)	36% (97 Usulan dari 270 Usulan)	37% (101 Usulan dari 270 Usulan)

2.2.3 Program Kerja

Bappeda Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dalam RKT 2019 dengan memperhatikan dokumen Renstra tahun 2017-2022 yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh. Adapun program-program yang telah ditetapkan BAPPEDA untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBK, meliputi:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
 - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
 - 1.10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 3.1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.
 - 3.3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- A. Program/Kegiatan Urusan Wajib:
 - 1. Pengembangan Data dan Informasi
 - 1.1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
 - 1.2. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 - 1.3. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - 1.4. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)
 - 1.5. Penyusunan Buku Tinjauan Perekonomian dan Statistik Kota Banda Aceh
 - 1.6. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil penelitian dan pengembangan
 - 2. Kerjasama Pembangunan
 - 2.1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
 - 3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - 3.1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - 4. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - 4.1. Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
 - 4.2. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang
 - 5. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 5.1. Penyusunan Rancangan RPJPD
 - 5.2. Penyusunan Rancangan RPJMD
 - 5.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - 5.4. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - 5.5. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
 - 5.6. Penyelenggaraan Musrena
 - 5.7. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh

6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - 6.1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

7. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - 7.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
 - 7.2. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
 - 7.3. Grand Design Pembangunan Kependudukan
 - 7.2. Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

3.1. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2019

Bappeda Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dalam RKT 2018 dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh.

Bappeda pada Tahun anggaran 2019 akan melaksanakan 11 (sebelas) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dilaksanakan 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
9. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

e. Program Pengembangan Data Informasi

Pada Program Pengembangan Data Informasi Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Updating Dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan
2. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
3. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)
5. Penyelenggara Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan

f. Program Kerjasama Pembangunan

Pada program Kerjasama Pembangunan Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

h. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

Pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1(satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 5 (Lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan RPJPD
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Penyelenggaraan Musrena
5. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh

j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

k. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
2. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
3. Grand Design Pembangunan kependudukan
4. Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	12 benda pos
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 Bulan
			3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis
			5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	10 Jenis
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis
			7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7986 porsi
			8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	50 Laporan
			9	Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	Jumlah waktu Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang yang disediakan	6 Bulan

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
					10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	34 jenis
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	120 kali
					4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	508 kali
				Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	59 stel/orang
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 org
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Penyusunan Rancangan RPJPD	Jumlah dokumen RPJPD	1 Dokumen
					1.1.2	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 buku

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1 Laporan
			2.2	Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Pendidikan	1 dokumen
					2.3.2	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Kesehatan	1 dokumen
					2.3.3	Grand design pembangunan kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen
					2.3.3	Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah dokumen Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	5 Lembaga
			3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	2 Laporan
			3.3	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1	Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan
					4.1.2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	1 Laporan
					4.1.3	Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan
					4.1.4	Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	Jumlah Peta Spatial	1 peta
					4.1.5	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	2 Laporan
			4.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 orang
					5.1.2	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	207 orang

3.2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab atau kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Pada tahun 2019 alokasi belanja langsung Bappeda sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan Walikota Banda Aceh sebesar Rp. 5.053.370.630,- dengan program/kegiatan beserta Indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	78% (144 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	70% (14 Indikator dari 20 Indikator Program RPJMD)
		2.1 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	34% (92 Usulan dari 270 Usulan)

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran per Program Tahun 2019

NO	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.196.932.850
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	740.088.020
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.450.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	35.000.000
5	Program pengembangan data informasi	1.118.398.470
6	Program Kerjasama Pembangunan	204.124.830
7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	223.581.260
8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	126.283.590
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	884.080.220
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	188.434.650
11	Program Perencanaan Pembangunan sosial Budaya	303.996.740
JUMLAH		5.053.370.630

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 merupakan suatu perencanaan tahunan yang menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran serta menjadi bahan dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2019.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Bappeda Kota Banda Aceh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun Kota Banda Aceh untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
						3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
						4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
						5 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
						6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						7 Penyediaan Makanan dan Minuman
						8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
						9 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
						10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
						2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
						3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
						4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
					Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan mesin atau kartu absensi
						2 Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Kebijakan		Program		Kegiatan		
								3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		
	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Penyusunan Rancangan RPJPD		
									1.1.2	Penyusunan Rancangan RPJMD	
										1.1.3	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh
						2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD
								2.2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
								2.3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
										2.3.2	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
										2.3.3	Grand design pembangunan kependudukan
										2.3.4	Pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
						3	Persentase OPD yang Renjanya	3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan			
			selaras dengan RKPDP		3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
					3.3	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	
							3.3.2	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang	
			4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target		4.1	Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
							4.1.2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	
							4.1.3	Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	
							4.1.4	Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	
							4.1.5	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	
							4.1.6	Penyusunan Buku Statistik Banda Aceh dan Buku Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh	
					4.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
			5	Persentase usulan	Pemeliharaan	5.1	Program Perencanaan	5.1.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
			masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	database yang terkoneksi dengan OPD	Pembangunan Daerah	5.1.2 Penyelenggaraan Musrena

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	12 benda pos
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 Bulan
			3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis
			5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	10 Jenis
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis
			7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7986 porsi
			8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	50 Laporan
			9	Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	Jumlah waktu Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang yang disediakan	6 Bulan

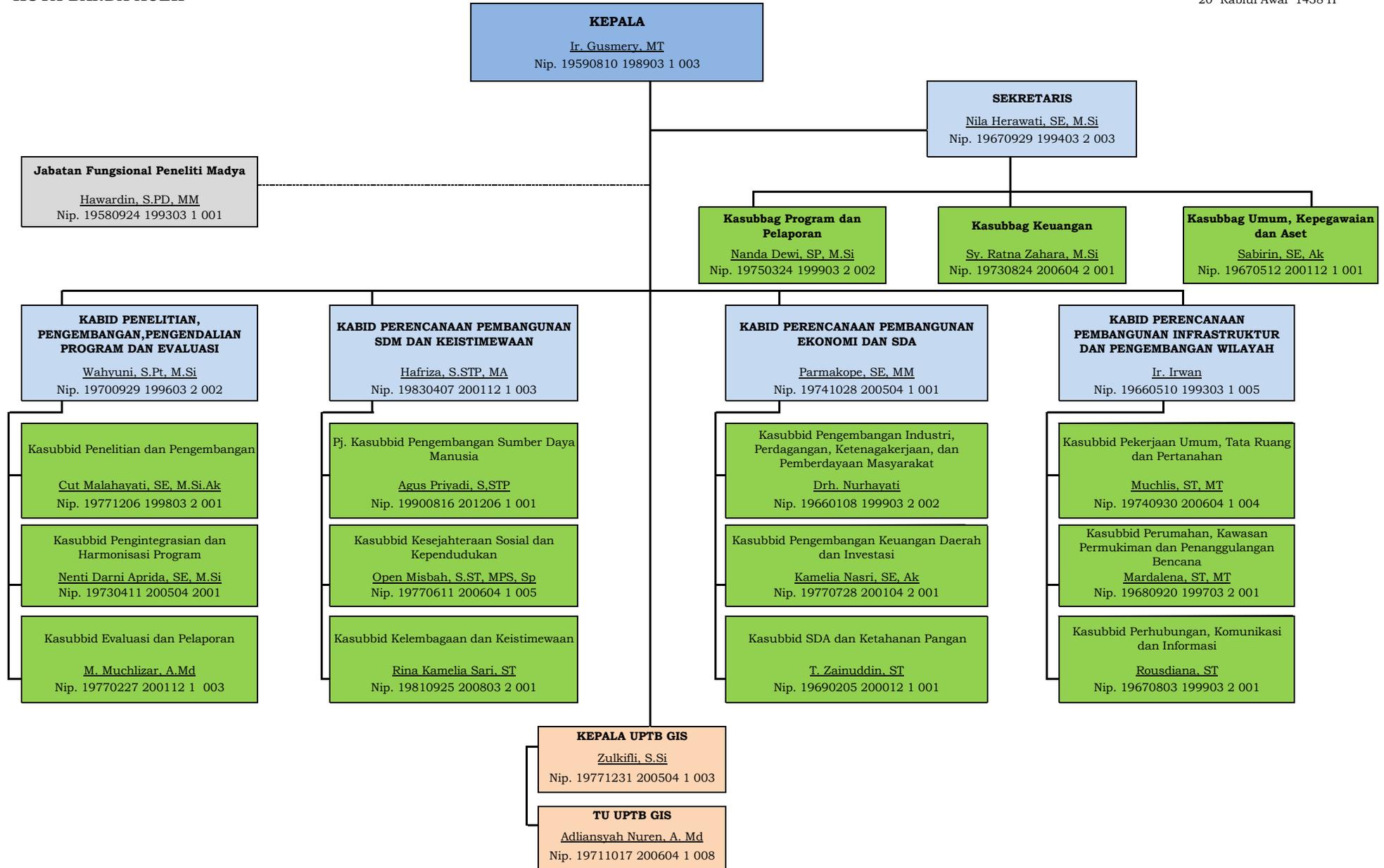
Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
					10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	34 jenis
					2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	120 kali
					4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	508 kali
				Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	59 stel/orang
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 org
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Penyusunan Rancangan RPJPD	Jumlah dokumen RPJPD	1 Dokumen
					1.1.2	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 buku

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1 Laporan
			2.2	Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Pendidikan	1 dokumen
					2.3.2	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Kesehatan	1 dokumen
					2.3.3	Grand design pembangunan kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen
					2.3.3	Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah dokumen Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	5 Lembaga
			3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	2 Laporan
			3.3	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1	Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan
					4.1.2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	1 Laporan
					4.1.3	Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan
					4.1.4	Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	Jumlah Peta Spatial	1 peta
					4.1.5	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	2 Laporan
			4.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
			5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
					5.1.2	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	207 orang

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA Banda Aceh**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 62 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 ————— : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>